



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3949/SK/BAN-PT/Akred/S/X/201

**Peran Multistakeholder Partnership Terhadap Sektor Pariwisata di
Indonesia (Studi Kasus; Danau Toba Sumatera Utara, Ubud Bali,
Pangandaran Jawa Barat)**

Tesis

Oleh

Vani Dwi Nurani

8081901008

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Bisnis
Program Studi Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Thesis

Nama : Vani Dwi Nurani
Nomor Pokok : 8081901008
Judul : Peran Multistakeholder Partnership Terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus; Danau Toba Sumatera Utara, Ubud Bali, Pangandaran Jawa Barat)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Magister
Pada Kamis, 16 Desember 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M

: 

Sekretaris

Sanerya Hendrawan, Ph.D

: 

Anggota

Dr. Maria Widyarini, S.E., MT

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Abstrak

Sektor pariwisata di Indonesia berkontribusi sebanyak 4% dari total perekonomian. Sektor pariwisata terdiri dari kawasan wisata, akomodasi dan perhotelan, budaya, rekreasi, souvenir dan restoran. Pengembangan sektor pariwisata perlu melibatkan beberapa aktor diantaranya adalah pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, akademisi, dan media. Tujuan dari adanya kerjasama ini adalah untuk mewujudkan tercapainya kesuksesan dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Kerjasama ini disebut dengan *multistakeholder partnership* atau kemitraan multipihak. Untuk mengidentifikasi *multistakeholder partnership* penelitian ini menggunakan Danau Toba, Ubud, dan Pangandaran sebagai perwakilan sektor pariwisata di Indonesia. Ketiga kawasan ini adalah perwakilan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan 88 kawasan lainnya. Dan masing-masing kawasan memiliki tujuan jangka panjang lainnya diantaranya menjadi kawasan superprioritas, *forbidden city*, dan objek pariwisata primadona.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analitis dengan metode penelitian studi kasus dengan pengumpulan data sekunder berbasis *trustworthiness*. Penelitian ini terfokus pada penguraian peran dari masing-masing aktor *multistakeholder partnership* dan mengevaluasi efektivitas dari para aktor dengan dukungan tolak ukur efektivitas lainnya yaitu kunjungan wisatawan dan tujuan jangka panjang. Serta merancang strategi *multistakeholder partnership* masa depan yang diharapkan dapat diterapkan bagi seluruh sektor pariwisata di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran dan kontribusi dari masing-masing aktor yaitu pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, akademisi dan media. Beberapa tolak ukur efektivitas efektif dan beberapa belum efektif. Untuk itu untuk perumusan strategi *multistakeholder partnership* di masa depan adalah Strategi Multistakeholder Partnership Pengembangan. Dimana strategi ini bersifat jangka panjang, berorientasi terhadap masalah dan pembentukan organisasi baru dalam mencapai kesejahteraan para aktor yang terlibat dalam kerjasama ini.

Kata kunci; sektor pariwisata, strategi multistakeholder partnership, efektivitas

Abstract

The tourism sector in Indonesia contributes as much as 4% of the total economy. The tourism sector consists of tourist areas, accommodation and hospitality, culture, recreation, souvenirs, and restaurants. The development of the tourism sector needs to involve several actors including the government, business people, social society, academia, and the media. The purpose of this collaboration is to achieve success in the development of the Indonesian tourism sector. This collaboration is called a multi-stakeholder partnership or multi-party partnership. To identify a multi-stakeholder partnership this research uses Danau Toba, Ubud, and Pangandaran as representatives of the tourism sector in Indonesia. These three areas are representatives of the *Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)* with 88 other areas. And each region has other long-term goals including being a super-priority area, forbidden city, and prima donna tourism object.

This research is qualitative descriptive-analytical with case study research methods with secondary data collection based on trustworthiness. The study focuses on describing the role of each actor in the multistakeholder partnership and evaluating the effectivity of the actors with the support of other effectivity measures, namely tourist visits and long-term goals. As well as designing a future multistakeholder partnership strategy that is expected to be applied to all tourism sectors in Indonesia.

This research shows that there are roles and contributions from each actor, namely the government, business people, civil society, academia, and the media. Some effectiveness measures are effective, and some are not yet effective. For this reason, the formulation of a multistakeholder partnership strategy in the future is the Multistakeholder Partnership Development Strategy. Where this strategy is long-term, problem-oriented, and the formation of new organizations in achieving the welfare of the actors involved in this collaboration.

Keywords; tourism sector, multi-stakeholder partnership strategy, effectivity

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini. Penulis tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mendapat gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan. Adapun judul dari tesis ini adalah Peran Multistakeholder Partnership Terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus; Danau Toba Sumatera Utara, Ubud Bali, Pangandaran Jawa Barat). Penyusunan tesis ini dibantu oleh banyaknya bimbingan, bantuan, serta semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti dengan segenap hati mengucapkan banyak terimakasih kepada;

1. Ibu Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M . sebagai dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis yang jauh dari kata baik ini. Terimakasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan selama membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
2. Kepada Bapak Sanerya Hendrawan, Ph.D dan Ibu Dr Maria Widyarini, S.E., M.T selaku pembahas. Terimakasih atas kesabaran, waktu, tenaga, ilmu dan masukan selama menjadi pembahas selama penulis menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada seluruh dosen Magister Ilmu Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu melalui pengajarannya sehingga penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan ini.
4. Kedua orangtua & keluarga penulis yang turut memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada teman-teman satu batch Magister Ilmu Administrasi Bisnis khususnya kepada Ibu Alya Mutiara dan Georgina. Terimakasih telah saling membantu dalam pengumpulan data dan waktu dalam bersama-sama menyusun karya ilmiah
6. Kepada teman-teman penulis yang selalu mendukung dan sabar menerima keluhan penulis.
7. Dan kepada penulis, terimakasih telah menulis karya ini dengan penuh semangat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Administrasi Bisnis.

Bandung, 4 Desember 2021

Vani Dwi Nurani

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Kerangka Pemikiran	9
BAB 2	12
LANDASAN TEORI	12
2.1 Industri Pariwisata	12
2.2 Strategi	19
2.2.1 Pengertian Strategi	19
2.2.2 Komponen Strategi	21
2.2.3 Tingkatan Strategi	21
2.3 Manajemen Strategi	22
2.3.1 Pengertian Manajemen Strategi	22
2.3.2 Tahapan Manajemen Strategi	22
2.4 <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	23
2.4.1 Pengertian <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	23
2.4.2 Jenis <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	28
2.4.3 Prinsip Dasar <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	29
2.4.4 Fungsi <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	31
2.4.5 Aktor & Peran <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	32

2.4.6	Tantangan <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	33
2.4.7	Tahapan <i>Multi Stakeholder Partnership</i>	34
2.5	Efektivitas.....	35
2.6	Penelitian Terdahulu	37
BAB 3	40
METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Metode Penelitian.....	40
3.3	Protokol Studi/Operasional Variabel	41
3.4	Unit Analisis.....	42
3.5	Sumber Data.....	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7	Teknik Analisa Data.....	44
3.8	Kerangka Penelitian	45
BAB 4	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1	Profil Objek Penelitian	48
4.1.1	Danau Toba Sumatera Utara.....	48
4.1.2	Ubud, Bali.....	51
4.1.3	Pangandaran, Jawa Barat	54
4.2	Analisa Peran <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Sektor Pariwisata Indonesia.....	58
4.2.1	Peran <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Danau Toba Sumatera Utara.....	59
4.2.2	Peran <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Ubud, Bali	67
4.2.3	Peran <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Pangandaran, Jawa Barat	73
4.3	Efektivitas Strategi <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Sektor Pariwisata Indonesia.....	80
3.8.1	Efektivitas Strategi <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Danau Toba Sumatera Utara .	81
4.3.2	Efektivitas Strategi <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Ubud, Bali	87
4.3.3	Efektivitas Strategi <i>Multi Stakeholder Partnership</i> Pangandaran, Jawa Barat	92
4.4	Rumusan Strategi Multistakeholder Partnership.....	101
BAB 5	105
Kesimpulan & Saran	105
5.1	Kesimpulan.....	105

5.2 Saran.....	107
Daftar Pustaka.....	111

Daftar Gambar

Gambar.1.1 Kerangka Pemikiran.....	10
Gambar 2.1 Roadmap multistakeholder partnership	27
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	46
Gambar 4.1 Sektor Pariwisata Danau Toba Sumatera Utara	48
Gambar 4.2 Geopark Toba Kaldera	49
Gambar 4.3 Desa Wisata Meat Ragi Hotang	49
Gambar 4.4 Sektor Pariwisata Ubud Bali	51
Gambar 4.5 Ubud Bali	52
Gambar 4.6 Gambaran penawaran Destinasi Wisata Ubud Bali	53
Gambar 4.7 Sektor Pariwisata Pangandaran Jawa Barat	54
Gambar 4.9 Gambaran Penawaran Destinasi Wisata Pangandaran Jawa Barat	56
Gambar 4.10 Roadmap MSP Danau Toba Sumatera Utara.....	66
Gambar 4.11 Roadmap MSP Ubud Bali.....	72
Gambar 4.12 Roadmap MSP Pangandaran Jawa Barat	78
Gambar 4.13 Grafik Kunjungan Wisatawan ke Danau Toba 2015-2018.....	83
Gambar 4.14 Kunjungan Wisatawan Domestik di Bali 2016-2018	89
Gambar 4.15 Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Bali 2016-2018	89
Gambar 4.16 Kiri Grafik Kunjungan Wisatawan Pangandaran, Kanan Kawasan Kunjungan Wisata Pangandaran per Kawasan	95
Gambar 4.17 Matriks Efektivitas Peran Multistakeholder Partnership Danau Toba, Ubud, Pangandaran	100

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tabel Prinsip Dasar Multistakeholder Partnership	30
Tabel 2.2 Aktor&Peran Multistakeholder Partnership	32
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Protokol Studi/Operasional Variabel	41
Tabel 4.1 Perbandingan Efektivitas Tiga Unit Analisis	102

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata di Indonesia berkontribusi kira-kira sebanyak 4% dari total perekonomian (Investments, 2019). Namun, di awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya pandemic covid-19 yang berasal dari China. Hal ini berdampak besar terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Menurut data dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun kurang lebih 44% selama pandemic (Kemenparekraf.go.id, 2020). Sementara itu kondisi pariwisata di Indonesia menurut Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Kemenparekraf), memprediksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya berkisar di angka 4 juta orang (dw.com, 2020). Berdasarkan panduan UNWTO, negara-negara yang selama ini memiliki kontribusi besar pendapatannya di sektor pariwisata perlu mengembangkan visi pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Hal ini penting karena destinasi wisata yang mengembangkan visi ini dianggap mampu terus berlanjut meskipun memiliki tantangan yang bersifat pasti. Selain itu, panduan dari UNWTO menganjurkan untuk fokus terhadap pasar turis lokal hingga nantinya destinasi wisata siap sepenuhnya dibuka untuk pasar yang lebih besar. Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 1969 menyatakan bahwa sektor pariwisata mencakup beberapa aspek diantaranya adalah usaha penyelenggaraan pelayanan untuk lalu lintas kepariwisataan dengan maksud mencari keuntungan di bidang akomodasi/perhotelan, kebudayaan, restoran, rekreasi, hiburan dan atraksi kebudayaan, biro perjalanan, usaha kepariwisataan (*guide business*), usaha cenderamata atau souvenir, usaha penerbitan kepariwisataan, penyelenggaraan tour dan perdagangan valuta (*money changer*).

Pengembangan sektor pariwisata melibatkan beberapa aktor yang terlibat dalam prosesnya baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta. Aktor-aktor ini bekerja sama dalam mewujudkan tercapainya kesuksesan dalam pengembangan sektor wisata di Indonesia. Kerjasama ini disebut dengan kemitraan multipihak dimana terdapat dua atau lebih aktor (pemerintah, pelaku bisnis dan pelaku di sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, media, dsb). Kemitraan multipihak akan memanfaatkan inti dari pengetahuan, keterampilan, keahlian, teknologi dan sumber daya dari masing-masing aktor dan aset yang dimilikinya untuk menciptakan solusi yang diharapkan dapat menciptakan sinergi dengan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di sebuah negara (Gabriel Eweje, 2020). Kemitraan multipihak harus didukung dengan kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan bergerak sesuai dengan tujuan dimana pelaku utama dan/atau pemangku kepentingan dari kemitraan multipihak bersama-sama menciptakan pengetahuan baru dan mengembangkan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah berkelanjutan yang kompleks (Peterson, 2013).

UN World Tourism Organization mengungkapkan bahwa kemitraan sektor pariwisata baik dari pemerintahan atau pihak swasta adalah gagasan utama untuk manajemen destinasi wisata yang sukses. Para pihak secara sukarela bertindak sesuai dengan koridornya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini tidak akan bisa diwujudkan jika tidak adanya kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam kasus pengembangan sektor pariwisata di Indonesia diantaranya adalah pemerintah, pihak swasta, masyarakat sekitar, media dan akademisi yang tanpa disadari bisa saja ikut serta mengembangkan sektor pariwisata. Dalam sektor ini adanya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta (biasanya pelaku inti bisnis) harus digabungkan secara longgar agar bisa

terwujudnya sektor pariwisata yang sesuai dengan yang diharapkan di daerah tersebut (Graci, 2016).

Dalam menjalankannya, sektor pariwisata membutuhkan organisasi atau komunitas yang membantu pariwisata memiliki keputusan yang strategis yang membuat bisnis bertanggung jawab terhadap tindakan bisnisnya. Sementara itu pemangku kepentingan lainnya diharapkan memiliki jaringan yang baik dengan alam sekitar dan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak baik pendiri wisata dan lingkungan sekitar mendapatkan keuntungan yang sama. Ketergantungan pengelolaan pariwisata pada keahlian teknis dan manajerial untuk menangani masalah lingkungan dan sosial. Pemangku kepentingan dalam manajemen pariwisata mencoba menanggapi kesenjangan dengan membuka tanggung jawab profesional untuk membangun strategi yang dikelola dengan baik oleh manajer pariwisata. Sektor pariwisata yang dianggap mewakili yang memenuhi beberapa karakteristik sektor pariwisata Indonesia menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 1969 diantaranya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Ubud di Bali dan Pangandaran Jawa Barat. Selain dengan adanya potensi pariwisata di kawasan tersebut, beberapa aspek pendukung turut melengkapi sektor pariwisata ini. Masing-masing dari daerah pariwisata tersebut menawarkan keindahan alam dan budaya yang berbeda-beda.

Danau Toba yang berlokasi di Sumatera Utara menawarkan keindahan danau terluas kedua di dunia yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) PBB pada tahun 2020. Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) bersamaan dengan Likupang, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika oleh Kemenparekraf RI. Hal ini dikarenakan kawasan Danau Toba menawarkan banyak keindahan

alam yang dapat menjadi ikon pariwisata Indonesia. Sampai hari ini pemerintah masih melakukan pengembangan dan perbaikan demi upaya memaksimalkan kawasan pariwisata Danau Toba. Pengembangan dan perbaikan meliputi infrastruktur dan masyarakat sebagai pelaku usaha. Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Danau Toba memiliki peluang investasi bagi pengusaha pariwisata dengan mengembangkan fasilitas dan layanan wisata perhotelan, wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner. Kawasan pariwisata Danau Toba juga dikenal dengan pusat tenun dengan kain tenun Ulos khas Sumatera Utara. Kain ulos menjadi daya tarik tersendiri bagi turis domestic dan mancanegara.

Ubud Bali merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Gianyar Bali yang terkenal sebagai daerah pariwisata dengan penawaran wisata budaya karena adanya Pura Ubud. Ubud terletak di tengah-tengah pulau Bali. Ubud menjadi pusat seni dan budaya di Bali. Beberapa hasil seni terkenal ada di Ubud diantaranya adalah seni tari, seni lukis, seni patung dan seni ukir. Wisata budaya yang ditawarkan di Ubud juga diantaranya adalah Pura Hindu dengan arsitektur yang unik. Wisata sejarah yang ditawarkan seperti adanya Goa Gajah dan Gunung Kawi dan didukung dengan wisata alam yang menawarkan keindahan hutan hujan tropis yang dihuni kera ekor panjang dan persawahan terasering. Beberapa aktivitas wisata saat ini mendukung pariwisata di Ubud seperti arung jeram dan menjelajahi area hutan dan desa menjadi penawaran pariwisata di Ubud. Disepanjang jalan raya toko-toko kerajinan berjejeran menawarkan hasil seni berupa lukisan, ukiran kayu, kerajinan tangan, kain khas Bali, dan perhiasan. Beberapa museum juga menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata seperti Museum Puri Lukisan, Arma Museum, Neka Museum dan Biaco Museum. Selain itu rencananya Ubud akan mengembangkan kawasan pariwisata menjadi Forbidden City untuk merealisasikan quality tourism di Bali. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

Bappenas menyatakan bahwa adanya pembentukan forbidden city di Ubud merupakan usaha dalam menarik kunjungan wisatawan berkuakitas alih-alih menggantungkan kualitas jumlah pengunjung (Bisnis.com, 2020).

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang dinobatkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang memiliki destinasi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan aneka kuliner dan souvenir khas Pangandaran. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 Pangandaran menjadi objek wisata primadona dengan Pantai Pangandaran yang terletak di Desa Pananjung dengan jarak 92km dari Kota Ciamis. Tidak hanya pantai, cagar alam seluas 530 Hektar yang didalamnya terdapat beberapa Goa Alam diantaranya adalah Goa Lanang, Goa Rengganis, Goa Sumur Mudal dan Goa Miring. Aktivitas wisata di Pangandaran tentunya di dominasi dengan aktivitas *watersport* seperti berenang, berperahu, memancing, jetski dan masih banyak lagi. Hotel, restoran, penginapan, pondok wisata, pelayanan pos, telekomunikasi, money changer, bioskop, diskotik dan beberapa pendukung sektor pariwisata sudah tersedia di Pangandaran. Selain Pantai Pangandaran beberapa kawasan wisata sebagai Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Sungai Citumang, Green Canyon, Hutan Bakau, dan beberapa kawasan pariwisata lainnya menjadi destinasi wisata lain di Kabupaten Pangandaran.

Atas dasar yang dipaparkan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang peran aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam kemitraan multipihak dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Beberapa aktor tersebut diantaranya adalah pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, akademisi dan media. Selain itu, untuk mengukur apakah strategi multistakeholder partnership telah efektif diterapkan atau belum akan

dilakukan analisis efektivitas. Dengan mengidentifikasi peran strategi multistakeholder partnership telah melakukan prinsip dan mencapai tujuannya. Untuk itu pada akhirnya penulis akan merekomendasikan perumusan strategi baru yang diharapkan dapat membawa sektor pariwisata Indonesia yang diwakili oleh Danau Toba, Ubud dan Pangandaran menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Adapun judul atau topik yang diambil dalam penyusunan penelitian ini adalah “Peran Multistakeholder Partnership terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia; Studi Kasus Danau Toba Sumatera Utara, Ubud Bali dan Pangandaran Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu industry yang cukup memberikan kontribusi dalam pendapatan ekonomi negara. Sektor pariwisata menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 1969 menyatakan bahwa sektor pariwisata mencakup beberapa aspek diantaranya adalah usaha penyelenggaraan pelayanan untuk lalu lintas kepariwisataan dengan maksud mencari keuntungan di bidang akomodasi/perhotelan, kebudayaan, restoran, rekreasi, hiburan dan atraksi kebudayaan, biro perjalanan, usaha kepariwisataan (*guide business*), usaha cenderamata atau souvenir, usaha penerbitan kepariwisataan, penyelenggaraan tour dan perdagangan valuta (*money changer*). Danau Toba di Sumatera Utara, Ubud di Bali, dan Pangandaran di Jawa Barat dipilih penulis karena dianggap dapat mewakili pariwisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketiga unit analisis tersebut termasuk kedalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata nasional dan memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial

dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mengembangkan ketiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) penulis merasa perlunya ada kerjasama antara beberapa aktor yang dianggap dapat memberikan kontribusi. Beberapa aktor tersebut diantaranya adalah pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, akademisi dan media. Kerjasama tersebut disebut juga dengan *multistakeholder partnership* yang merupakan kerjasama antar pihak dalam memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dari masing-masing aktor dalam menciptakan solusi pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Kerjasama ini dilakukan tidak lain untuk meningkatkan daya tarik wisata dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Daya tarik wisata sendiri menurut Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dalam penelitian ini penulis akan mengukur keberhasilan atau efektivitas dari kontribusi kelima aktor terhadap organisasi kepariwisataan dari masing-masing unit analisis. Selain itu akan diukur juga efektivitas dari kunjungan wisatawan ke masing-masing unit analisis dengan jangka waktu tiga tahun yaitu 2016, 2017 dan 2018 (sebelum pandemic covid-19) dan ukuran efektivitas dari keberhasilan tujuan jangka panjang dari tiga unit analisis. Penulis juga akan memberikan usulan strategi *multistakeholder partnership* untuk kawasan pariwisata secara umum sebagai rekomendasi. Dengan harapan dapat membantu untuk memajukan kawasan pariwisata di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Maka dari itu rumusan masalah penelitian ini diantaranya adalah:

- (1) Apa peran masing-masing aktor dalam *multi stakeholder partnership* dari Danau Toba, Ubud dan Pangandaran?
 - (a) Peran pemerintah,
 - (b) Peran masyarakat sipil,
 - (c) Peran pelaku bisnis,
 - (d) Peran akademisi,
 - (e) Peran media
- (2) Bagaimana efektivitas strategi *multistakeholder partnership* yang diterapkan selama ini dari tiga kawasan pariwisata?
- (3) Apa rumusan strategi *multistakeholder partnership* yang bisa diterapkan dalam memajukan sektor pariwisata di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan:

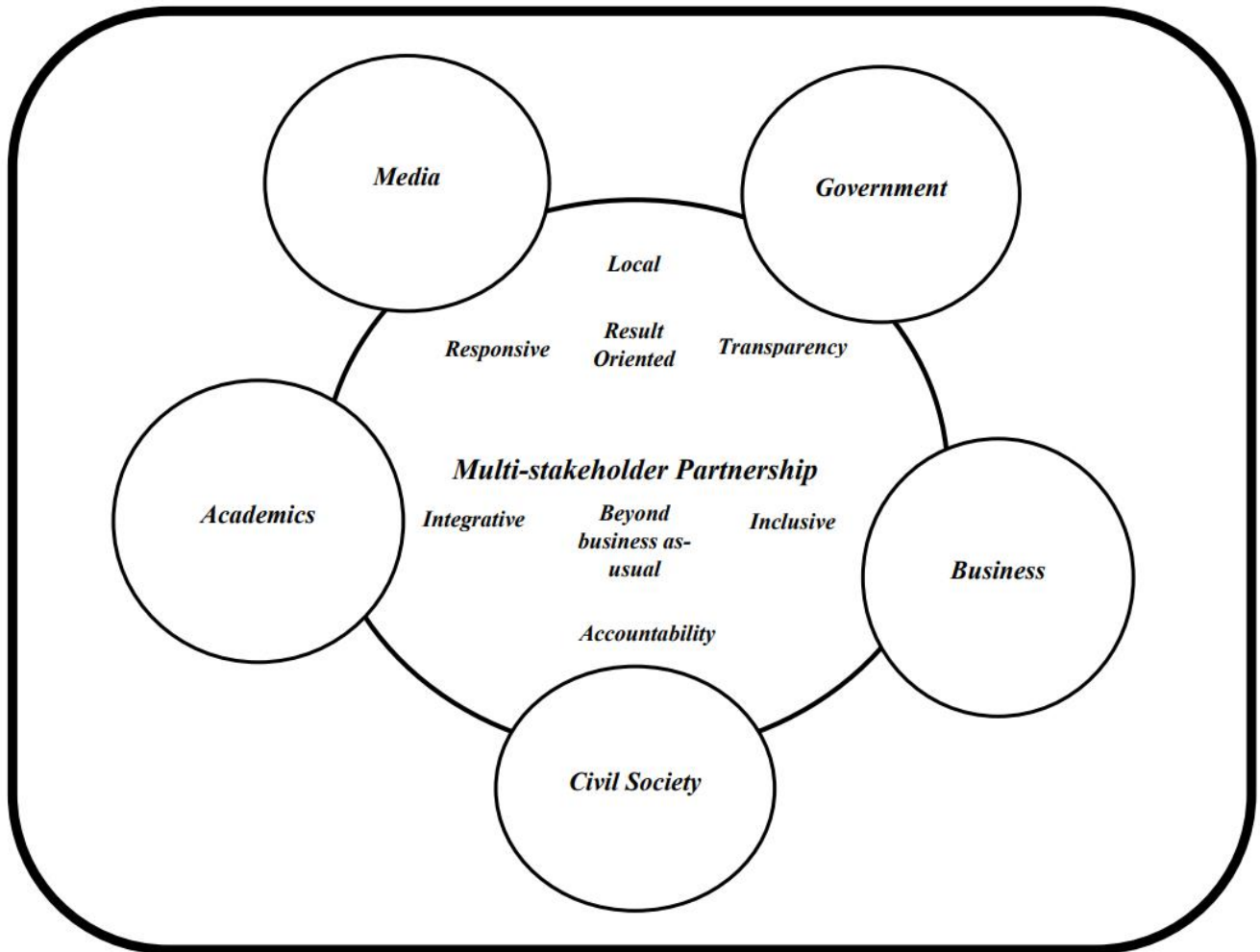
- (1) Untuk mengetahui peranan masing-masing aktor *multi stakeholder partnership* Danau Toba, Ubud, dan Pangandaran.
- (2) Untuk mengetahui efektivitas strategi *multi stakeholder partnership* yang diterapkan tiga kawasan wisata pariwisata selama ini.
- (3) Untuk mengetahui strategi bisnis apa yang bisa diterapkan *multi stakeholder partnership* dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan ditulisnya penelitian ini dapat berguna bagi sektor pariwisata di Indonesia, pihak yang memerlukan, maupun penulis sendiri. Adapun harapan penulis:

- Bagi sektor pariwisata di Indonesia:
 - Membantu sektor pariwisata di Indonesia dalam mempelajari peranan masing-masing aktor dalam kemitraan multipihak atau *multi stakeholder partnership* dan menentukan strategi bisnis yang bisa diterapkan sektor pariwisata di Indonesia saat ini dan waktu yang akan datang.
- Bagi pihak yang memerlukan:
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai ilmu tambahan dan informasi yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang memerlukan khususnya sektor pariwisata.
- Bagi penulis:
 - Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan, pengalaman serta ilmu-ilmu nyata dalam menjalankan sebuah bisnis khususnya bisnis di sektor industri pariwisata.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar.1.1 Kerangka Pemikiran

Kemitraan melibatkan dua pihak atau lebih diantaranya adalah pemerintah, pelaku bisnis atau pelaku sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, media, dan badan pendukung lainnya. Kemitraan biasanya memanfaatkan inti dari pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan assetnya masing-masing untuk menciptakan solusi yang dirasa tidak satupun pihak bisa menyelesaikan sendiri. *Multi-stakeholder partnership* adalah salah satu mekanisme untuk memobilisasi dan berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi, sumber daya, keuangan dan menyeimbangkan di berbagai sektor yang diharapkan dapat menciptakan sinergi dengan mendukung pencapaian tujuan

pembangunan yang berkelanjutan di sebuah negara (Gabriel Eweje, 2020). Dalam mengidentifikasi peran dari aktor-aktor multistakeholder partnership perlu dibuktikan bahwa para aktor menerapkan prinsip dasar *multistakeholder partnership*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam “Panduan Kemitraan Multipihak; untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” menyatakan beberapa prinsip dasar *multistakeholder partnership* diantaranya adalah *local, accountability, transparency, integrative, responsive, inclusive, result oriented, beyond business as usual*. Hal ini juga didukung dengan pemenuhan fungsi-fungsi strategi *multistakeholder partnership* yang akan diidentifikasi apakah sudah tercapai atau bahkan belum terlaksana. Penelitian ini akan melihat bagaimana setiap unit analisis menerapkan prinsip-prinsip dasar dari *multistakeholder partnership*. Kontribusi para aktor terhadap keberhasilan program untuk organisasi kepariwisataan akan menjadi tolak ukur dari efektivitas MSP. Sementara itu, dua tolak ukur tambahan yaitu kunjungan wisatawan dan keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka panjang akan menjadi tolak ukur untuk menentukan keefektivan strategi ini. Hasil dari penelitian ini penulis akan merekomendasikan strategi MSP.